

**SEJARAH NAGARI AMPANG GADANG KECAMATAN AMPEK  
ANGKEK KABAUPATEN AGAM SETELAH KEMBALI KE  
PEMERINTAHAN NAGARI 2001-2019**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Humaniora Pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas*

**Dosen Pembimbing:**

**Dr. Mhd. Nur, M. S.**



**Oleh:**

**M. FAJRY SUBETRI**

**1510711018**

**JURUSAN ILMU SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS**

**2022**

## ABSTRAK

**Skripsi ini berjudul “Sejarah Nagari Ampang Gadang Kecamatan Ampek Angkek Kabupaten Agam Setelah Kembali Ke Pemerintahan Nagari 2001-2019”.** Fokus kajian ini yakni perubahan sistem pemerintahan desa menjadi sistem pemerintahan nagari di Ampang Gadang pada tahun 2002 sampai tahun 2019. Pemerintahan desa dirasa tidak cocok dengan kultur dan budaya Minangkabau yang ada di Ampang Gadang. Tidak cocoknya pemerintahan desa dirasakan oleh tokoh masyarakat hingga sampai ke masyarakat. Kemudian pada tahun 1999 pemerintahan desa diganti dengan pemerintahan nagari yang memiliki slogan *babaliak ka nagari*.

Skripsi ini mengkaji perkembangan pemerintahan setelah kembali ke pemerintahan nagari di Ampang Gadang. Dalam suatu pemerintahan maka tidak akan terlepas kedalam pembahasan demokrasi serta otonomi daerah. Di suatu pemerintahan nantinya juga akan berdampak terhadap kondisi sosial, ekonomi, serta budaya, dengan menerapkan kebijakan-kebijakan dari para pemangku jabatan untuk kemaslahatan rakyatnya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni dengan metode sejarah. Terdiri dari empat tahap yaitu heuristik (pengumpulan data), kritik sumber, interpretasi (menafsirkan data), dan yang terakhir historiografi (penulisan). Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan lapangan melalui metode sejarah lisan dan wawancara. Sumber yang didapat di kritik dengan tujuan menguji kebenarannya. Setelah itu dilakukan interpretasi atau penafsiran dari sumber. Terakhir dilakukan historiografi atau penulisan.

Dampak positif yang dirasakan dari terlaksananya pemerintahan desa di antaranya makin mudahnya masyarakat melaksanakan urusan administratif di desa sendiri tanpa harus mengunjungi desa lain. Anggaran dana bantuan dari pemerintah pusat menjadi lebih banyak. Dari sisi negatif diterapkannya pemerintahan desa yaitu kekompakan dari masyarakat menjadi berkurang karena setiap desa sudah menjadi daerah yang otonom. Selanjutnya fungsi dari ninik mamak yang mulai memudar dengan mulai ditinggalkannya hukum adat. Setelah kembali bernagari pada tahun 1999. Pemerintahan nagari yang diterapkan diharapkan mampu mengatasi permasalahan selama pemerintahan desa. Kembalinya ke sistem pemerintahan nagari disambut baik oleh setiap kalangan dari Nagari Pariangan dan dirasa pas berada di Sumatera Barat.

**Kata Kunci: Dampak, Desa, Nagari, Ampang Gadang, Perubahan Pemerintahan**